BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, maka penelitian ini berdasarkan kepada teori-teori yang relevan sehingga sejalan dan untuk tercapainya penelitian yang ilmiah.

2.1.1 Konsep Ketenagakerjaan

2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Mulyadi (2003:59) Tenaga kerja adalah jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Sumber daya manusia ini mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa, pengertian pertama ini mengandung aspek kualitas. Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha tersebut, pengertian kedua ini mengandung aspek kuantitas. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenga kerja atau *man power*. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Simanjuntak, 2001:1)

Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja. Dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan lain dan yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Sumarsono, 2009:3)

2.1.1.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Menurut Sukirno (2013:18) untuk menemukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi yaitu:

a. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15-64 tahun yang ada disebut dengan penduduk usia kerja
b. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela) penduduk ini merupakan penduduk bukan angkatan kerja

2.1.1.3 Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro (2003:307) penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja.

Sektor yang memperkerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional (Simanjuntak 2001:97).

2.1.1.4 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansti tertentu. Biasnya permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja (Sumarsono, 2006:105).

Besar kecilnya elastisitas permintaan terhadap tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memungkinkan subtitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lainnya, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan dan elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Semakin kecil kemungkinan mensubtitusi modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja, semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja dan semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap dalam produksi semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja (Sumarsono, 2003:81-82)

Menurut Simanjuntak (2005:105) permintaan adalah suatu hubungan antara harga atau kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja permintaan adalah hubungan antara tingkat upah (yang ditilik dari persepektif majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk di pkerjakan dalam hal ini dapat dikatakan dibeli. Dalam banyak literatur ekonomi mengemukakan permintaan akan suatu produk (harga dan jasa) akan ditentukan banyak faktor dimana faktor tersebut adalah:

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang lain yang sejenis
3. Pendapat konsumen
4. Selera konsumen
5. Ramalan konsumen mengenai keadaan dimasa yang akan datang

Menurut Sumarsono, (2003:23) permintaan tenaga kerja dengan tinggi

Rendahnya biaya produksi perusahaan atau instansi tertentu. Biasnya permintaan akan tenaga kerja di pengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

1. Perubahan tingkat upah

   Dalam jangka pendek kenaikan tingkat upah di antisipasi perusahaan dengan mengurangi produksinya. Turunya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja karena turunya skala produksi disebut dengan efek skala produksi. Dalam jangka panjang kenaikkan upah akan dkirespon perusahaan dengan

penyesuaian terhadap input yang digunakan. Perusahaan akan menggunakan teknologi padat modal dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang seperti mesin. Kondisi ini terjadi bila tingkat upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin disebut efek subtitusi tenaga kerja.

2. Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen

   Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

3. Harga barang modal turun

   Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusaahan akan meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

Konsep dasar permintaan tenaga kerja seperti yang di atas telah di kembangkan oleh para ahli ekonomi tenaga kerja dengan menggunakan model-model yang cukup komplek. Fungsi produksi memperlihatkan hubungan yang terjadi antara berbagai input faktor produksi dan output perusahaan. Dengan teknologi tertentu semakin banyak input pekerja dan modal yang digunakan, semakin besar output yang dihasilkan secara umum dapat dikatakan bahwa setelah pekerja digunakan, output mulai meningkat dengan tambahan yang kecil. Keadaan

ini merupakan ciri setiap proses produksi dalam jangka pendek. Hasil yang mengecil mempunyai implikasi yang penting bagi analisis ekonomi. Impliksi utamanya adalah bahwa perusaahaan hanya mau menggunakan tambahan input pekerja dengan upah yang lebih rendah, karena setelah pekerja digunakan setiap tambahan pekerjaan akan memberi tambahan output yang kecil. Dalam ekonomi pasar diasumsikan seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga. Perusahaan disebut *price taker,* perusahaan sebagai penerima harga pasar yang berlaku dan tidak dapat merubah harga dengan menaikkan atau menurunkan produksinya. Perusahaan dapat menjual beberapa saja produksinya dengan harga yang berlaku. Dalam memaksimalkan laba pengusaha hanya dapat mengatur beberapa jumlah karyawan yang di pekerjakan. Penyediaan dari bahan-bahan pelengkap dalam produksi, misalnya modal, tenaga listrik, bahan mentah dan lain-lain. Modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha dapat berupa uang atau barang, misalnya mesin-mesin. Mesin digerakan oleh tenaga kerja dan sumber-sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Semakin banyak kapasitas dan jumlah mesin yang dikelola oleh manusia semakin banyak kapasitas dan jumlah mesin yang dikelola oleh manusia. Semkain besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap, semkain besar elastisitas permintaan tenaga kerja.

2.1.1.5 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga

bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasrkan pada teori tentang konsumen dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah (Sumarsono, 2006:407).

Penawaran tenaga kerja dalam sesuatu jenis pekerjaan sangat besar perananya dalam menentukan upah di perusahaan. Didalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaan, upah untuk mencapai tingkat yang rendah. Sedangkan, di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaanya sangat besar upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi (Sukirno, 2003:369).

2.1.2 Investasi

2.1.2.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi, 2001:284). Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatam sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2003:2).

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003:62).

Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya atau uang saat ini (sekarang/*present*) dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Menanamkan uang sekarang berarti uang tersebut yang seharusnya di konsumsi, namun karena kegiatan investasi, dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa mendatang. Artinya investasi juga dapat didefinisikan dengan mengorbankan peluang konsumsi saat ini dengan mengharapkan dapat keuntungan kedepan (Faisal, 2007:432)

2.1.2.2 Jenis-jenis Investasi

Menurut Rosyidi (2000:169) jenis-jenis investasi dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Berdasarkan pada unsur pendapatan nasional
    a) Investasi Otonom (*Autonomos Invesment),* merupakan investasi yang perubahannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan dalam hal ini pendapatan nasional
    b) Investasi Terimbas (*Induced Invesment),* adalah investasi yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional
2. Berdasarkan Subjeknya
    a) Investasi Pemerintah (*Public Investment),* merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat

b) Investasi Swasta (*Private Investment)*, merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan

3. Berdasarkan Alasanya

a) Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam miodal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

b) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

4. Berdasarkan Unsur Pembentukannya

a) Investasi Bruto (*Gross Investment)*, merupakan total dari seluruh investasi yang dilakukan oleh suatu negara pada suatu ketika atau pada waktu tertentu

b) Investasi Neto (*Net Investment),* merupakan hasil dari investasi bruto yang dikurangi dengan penyusutan (*depreciation)* atau disebut investasi bersih

2.1.2.3 Aspek-Aspek Kelayakan Investasi

Aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penentuan layak atau tidaknya suatu program adalah mencakup aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek financial, ekonomi dan ditribusi (Widodo, 2006:255)

1. Aspek teknis

   Analisis ini berhubungan dengan input investasi (penyediaan) dan output (produksi) berupa barang dan jasa.

2. Aspek sosial budaya

   Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pendapatan termasuk aspek lingkungan sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi golongan masyarakat

3. Aspek financial

   Aspek ini meninjau dari sudut peserta investasi secara individual dan menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu investasi yang diusulkan terhadap para peserta yang tergabung di dalamnya

4. Aspek ekonomi

   Aspek ekonomi akan menganalisis apakah suatu investasi yang diusulkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunanperekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan

5. Aspek distribusi

   Aspek ini menyangkut putusan yang dihubungkan dengan masalah distribusi pendapatan dan pelayanan. Berkaitan dengan distribusi

pendapatan, kesempatan yang besar untuk investasi dapat mempercepat pertumbuhan

2.1.2.4 Penilaian Kelayakan Investasi

Menurut Widodo (2006:253-255) untuk mengevaluasi efisiensi suatu investasi, maka langkah yang diambil adalah:

1. Menentukan suatu manfaat dan biaya dari investasi yang akan dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah
3. Menghitung nilai bersih sekarang (*net present benefit)*. NPB dipandang sebagai alat analisis yang terbaik dalam menentukan suatu investasi
   1. Menentukan.
   2. Menghitung manfaat dan biasa dalam rupiah.
   3. Menghitung nilai bersih sekarang (Net Present Benefit). NPB dipandang sebagai alat analisis yang terbaik dalam menentukan suatu investasi

2.1.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Daerah

Banyaknya faktor yang mempengaruhi investasi di daerah. KPPOD (2003) mendefinisikan faktor-faktor dan variabel yang dominan mempengaruhi daya tarik investasi daerah (Widodo, 2006: 154). Pertama, faktor Ekonomi Daerah berkaitan dengan keunggulankeunggulan komparatif dan kompetitif (*comparative and competitive advantages*) daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang daya tarik investasi daerah adalah:

1. Potensi ekonomi

   Potensi daerah mencakup potensi fisik serta non fisik di daerah tersebut. Faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, sumber daya sosial merupakan faktor yang menjadi pertimbangan terhadap daya tarik investasi suatu daerah

2. Struktur ekonomi

   Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui analisis jumlah nilai tambah (value added) bruto sektor di daerah tersebut. Kedua, Faktor tenaga kerja dan produktivitas berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia daerah. Dari segi SDM yang perlu diperhatikan adalah:

1. Ketersediaan tenaga kerja

   Investasi memerlukan jumlah tenaga kerja yang tersedia berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan

2. Biaya tenaga kerja

   Biaya tenaga kerja dapat tercermin melalui tingkat upahnya. Semakin kecil tingkat upah maka hal itu akan semakin menambah daya tarik daerah tersebut.

3. Produktivitas tenaga kerja

   Semakin produktif tenaga kerja di suatu daerah maka semakin menarik investor dalam melakukan investasi di daerah tersebut. Produktivitas tenaga kerja dicerminkan melalui perhitungan pembagian antara besarnya PDRB suatu sektor ekonomi dengan jumlah tenaga kerja di sektor tersebut.

2.1.3 Produk Domestik Bruto (PDB)

2.1.3.1 Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara. Di dalam suatu perekonomian suatu perekonomian, di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh negara lain. Selalu didapati produksi nasional oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri (Sukirno, 2008:35).

Menurut Nanga (2005:13) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai atau harga pasar (*Market Price*) dari seluruh barang dan jasa akhir (*Final goods and service*) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh seluruh warga pada suatu wilayah negara yang bersangkutan dalam periode tertentu (Prasetyo, 2011:28)

Menurut McEachern (2000:146) ada dua jenis Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu:

1. PDB Riil/Harga Tetap, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu (umumnya satu tahun) dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku dalam kurun waktu tertentu

2. PDB Nominal/Harga Berlaku, yaitu total nilai harga barang dsan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu dan dinilai menurut harga yang berlaku pada saat dilakukan penilaian

2.1.3.2 Komponen Poduk Domestik Bruto (PDB)

Menurut Mankiw (2006:11) Komponen dari produk domestik bruto (PDB) dapat dibagi atas empat komponen yaitu: Konsumsi (C), Investasi (I), Belanja Negara (G) dan Ekspor Neto (NX)

$$Y = C + I + G + NX$$

Persamaan ini merupakan persamaan identitas sebuah persamaan yang dilihat dari bagaimana variabel-variabel persamaan tersebut dijabarkan yaitu:

1. Konsumsi Private atau *Private Comsumption* yaitu menghitung konsumsi dari individu atau rumah tangga atau beberapa jenis barang seperti:
    a) *Durable Goods* yaitu barang yang awet atau tidak cepat rusak yang pada umumnya memiliki umur yang relative panjang atau bisa dikatakan lebih dari tiga tahun. Contoh mobil dan motor
    b) *Non-Durable Goods* yaitu barang yang langsung dikonsumsi dan habis manfaatnya. Contoh makanan dan minuman
2. Investasi atau *Investment* yaitu menghitung suatu pengeluaran untuk barang modal. Contoh program baru dan berbagai jenis investasi lainnya
3. Pengeluaran pemerintah atau *Goverment Spending* yaitu menghitung semua pengeluaran yang pemerintah lakukan. Contoh: membayar gaji PNS atau pegawai pemerintah, membangun jalan dan lain-lain

4. Ekspor Bersih atau *Net Export* yaitu menghitung selisih didapat dari total export yang dikurangi total impor

2.1.3.3 Cara Perhitungan dan Penyajian PDB

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), cara perhitungan PDB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan produksi

   Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2. Pendekatan pendapatan

   Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap produksi Pendapatan nasional yang dimaksud diperoleh melalui penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis pendapatan, diantaranya:

   a) Kompensasi Kompensasi untuk pekerja terdiri dari upah (wages) dan gaji (salaries) ditambah faktor lain terhadap upah dan gaji (misalnya, rencana dari pengusaha dalam hal pensiun dan dana jaminan sosial).
   b) Keuntungan perusahaan merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana digunkan untuk membayar pajak

keuntungan perusahaan, dibagikan kepada para pemilik saham sebagai deviden dan ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

c) Pendapatan usaha perorangan merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari self employeed person, self employeed professional dan lain-lain
d) Pendapatan sewa merupakan kompensasi yang untuk pemilik tanah, rental business dan recidential properties.
e) Bunga

   netto atau net interest terdiri dari bunga yang dibayarkan perusahaan dikurangi bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri, bunga yang dibayar pemerintah dan konsumen tidak termasuk didalamnya

2.1.4 Unit Usaha

2.1.4.1 Pengertian Unit Usaha

Badan Pusat Statistik (2010) mendeifinisikan unit usaha yaitu unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah.

Menurut Prabowo (dalam Lestari 2011:42) unit usaha merupakan unit yang dilakukan suatu badan yang memilki wewenang dan didasarkan oleh berbagai wilayah operasionalnya. Sedangkan perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

2.1.5 Upah Minimum

2.1.5.1 Pengertian Upah Minimum

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sektoral. Dalam hal ini upah minimum merupakan upah pokok yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali bekerja. Pada upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan sandang, pangan dan keperluan rumah tangga lainnya (Sumarsono, 2003:141)

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan Perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh dan pekerja.

Sukirno (2005:351) membuat perbedaan diantara dua pengertian upah yaitu:

1. Upah Nominal (Upah Uang) adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
2. Upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

2.1.5.2 Jenis-jenis Upah Minimum

Menurut Rusli (2003:120) jenis-jenis upah minimum dapat terbagi atas:

1. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/kota.

   Besar upah untuk setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidaklah sama, tergantung dari nilai kebutuhan minimum di daerah yang bersangkutan. Setiap Kabupaten/Kota tidak boleh menetapkan upah di bawah minimum Provinsi yang bersangkutan.
2. Upah minimum berdasrkan sektor/sub-sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota

   Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok usaha tertentu. Misalnya: kelompok usaha manufaktur dan non faktur. Upah minimum sektoral ini tidak boleh lebih rendah dari upah minimum di daerah yang bersangkutan.

2.1.5.3 Sistem Pengupahan di Indonesia

Secara umum sistem upah menurut Gilarso (2003) adalah sebagai berikut:

a. Upah Menurut Prestasi (Upah Potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan jika hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai dan lain-lain)

b. Upah Waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan. bisa dihitung per-jam, per-hari, per-minggu atau per-bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per-potong.

c. Upah Borongan

Upah Borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya: untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur dan lain-lain.

d. Upah Premi

Upah Premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi “normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu,

pekerja tersebut diberi “premi”. Premi juga dapat diberikan misalnya: untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *time* and *motion study* (waktu dan studi gerak)

e. Upah Bagi hasil

Upah bagi hasil merupakan cara yang biasa digunakan dalam bidang pertanian dan dalam usaha keluarga.

f. Peraturan Gaji Pegawai Negeri (GPNS)

Gaji pegawai negeri sipil (GPNS) berdasarkan kepada dua prinsip yaitu pendidikan dan masa kerja. setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

2.1.5.4 Komponen Upah Minimum

Menurut Sumarsono (2009:182) ada tiga komponen yang mempengaruhi upah minimum yaitu:

1. Kebutuhan Fisik Minimum

Kebutuhan fisik minimum adalah kebutuhan minimum selama sebulan dari seorang pekerja yang diukur menurut kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan minimum seorang pekerja dan syarat-syarat kesehatan

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

   Pada prinsipnya perkembangan indeks harga konsumen (IHK) mempengaruhi perkembangan kebutuhan hidup minimum (KHM), sebab komponen-komponen yang tercantum dalam kebutuhan hidup minimum (KHM) sudah termasuk dalam komponen indeks harga konsumen (IHK).

3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

   Untuk hal ini setiap daerah perlu mengadakan komunikasi dengan daerah lain yang berdekatan atau perbatasan untuk memperoleh informasi tingkat upah terendah yang berlaku di daerah tersebut. Kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, dalam upaya penetapan usulan upah minimum, perlu dipertimbangkan hal ini penting agar upah yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan gejolak dalam pelaksanaanya.

2.1.6 Inflasi

2.1.6.1 Pengertian Inflasi

Menurut Shafrizal (2014:253), Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikkan harga satu atau dua barang saja tidak disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga barang-barang yang diakibatkan misalnya musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi.

Menurut Boediono (2011:9) Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihanya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.

2.1.6.2 Jenis Inflasi Menurut Penyebabnya

Menurut Sukirno (2008) jenis inflasi menurut penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Full Inflation*)

   Inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

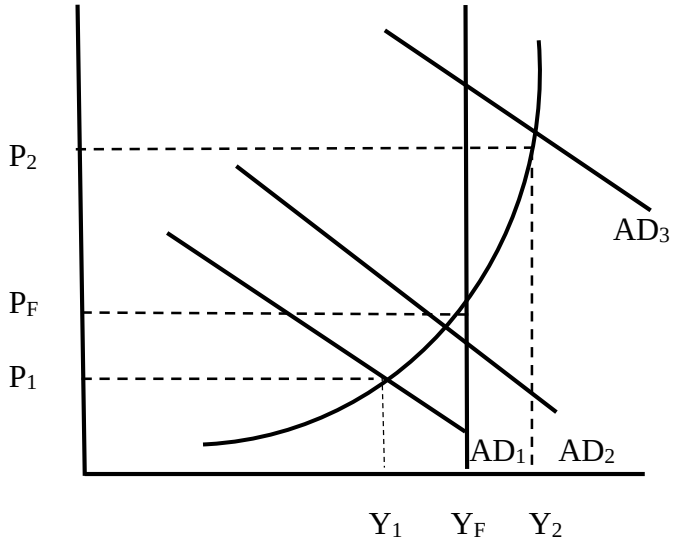

Gambar 2.1: Inflasi Tarikan permintaan

Sumber, Sukrino, 2008

Pada gambar di atas dapat digunakan untuk menerangkan wujudnya infasi tarikan permintaan. Misalkan pada mulanya permintaan agregat adalah AD_1. Maka pendapatan nasional adalah Y_1, dan tingkat harga adalah P_1. Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat yaitu AD_2. Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh yaitu Y_f dan tingkat harga naik dari P_1 ke P_f, Ini berarti inflasi wujud. Apabila masyarakat masih menambah pengeluarannya maka permintaan agregat menjadi AD_3. Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan pendapatan nasional riil meningkat dari Y_f menjadi Y_2. Kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat yaitu dari P_f ke P_2.

Inflasi tarikan permintaan juga berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Dalam masa seperti ini, pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan biaya pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa, maka keadaan ini mewujudkan inflasi.

2. Infasi Desakan Biaya (*Cosh Push Inflation*)

Inflasi ini berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Inflasi desakan biaya ada mulanya keseimbangan ekonomi negara tercapai pada pendapatan nasional Y_1, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh, dan tingkat harga adalah P_1. Pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi perusahaan-perusahaan sangat memelukan tenaga kerja. keadaan ini cenderung akan menyebabkan kenaikkan upah dan gaji karena:

a) Perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan upah dan gaji.

b) Usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi.

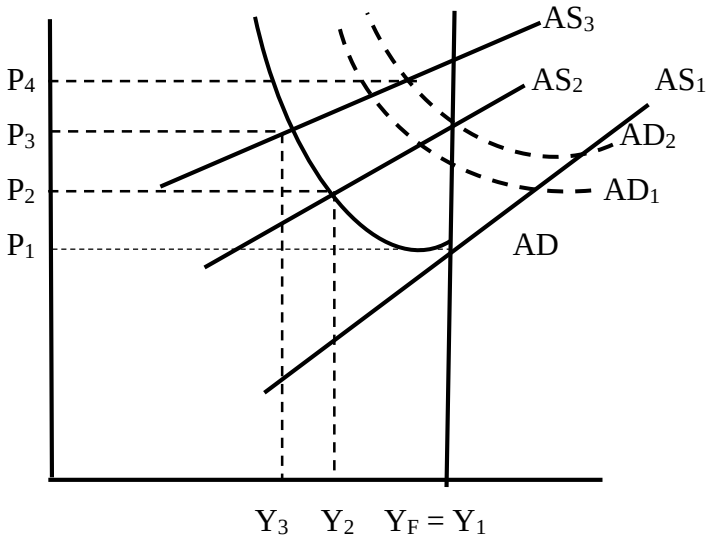

Gambar 2.2: Inflasi Desakan Biaya

Sumber: Sukrino, 2008

Kenaikkan upah akan menaikan biaya, dan kenaikan biaya akan memindahkan fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS_1 menjadi AS_2. Akibatnya tingkat harga naik dari P_1 menjadi P_2. Harga barang yang tinggi ini mendorong para pekerja menuntut kenaikkan upah lagi, maka biaya produksi semakin tinggi. Pada akhirnya akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS_2 menjadi AS_3. Perpindahan ini menaikkan harga dari P_2 ke P_3. Dalam proses kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan penawaran agregat ini pendapatan nasional rill terus mengalami penurunan yaitu Y_f (atau Y_1)

menjadi Y_2 dan Y_3. Berarti akibat dari kenaikan upah tersebut kegiatan ekonomi akan menurun di bawah tingkat kesempatan kerja penuh.

Dalam analisis di atas diandalkan kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti kenaikan dalam permintaan agregat riil. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan harga akan menjadi semakin cepat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan. Andaikan setelah AS_1 menjadi AS_2 permintaan agregat AD berubah menjadi AD_1. Akibat dari perubahan ini kesempatan kerja penuh tetap tercapai, tetapi tingkat harga lebih tinggi dari P_2. Apabila proses kenaikan upah baru berlaku, penawaran agregat akan bergerak dari AS_2 ke AS_3. Sekiranya ini diikuti oleh kenaikan permintaan agregat menjadi AD_2 maka tingkat kesempatan kerja penuh masih tetap tercapai, tetapi harga-harga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P_3 yaitu menjadi P_4.

2.1.6.3 Efek Inflasi

Menurut Nopirin (2014) inflasi dapat menimbulkan efek bagi pemerintahan maupun kondisi politik. Efek-efek inflasi tersebut adalah:

1. Efek Terhadap Pendapatan

   Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi, demikian juga orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaiknya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah yang

memperoleh kenaikan pendapatan dengan prsentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan presentase lebih besar fari laju inflasi.

2. Efek Terhadap Efisiensi

   Permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain karena inflasi yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

3. Efek Terhadap Output

   Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi, namun apabila laju inflasi cukup tinggi dapat mempunyai akibat sebaliknya yaitu peneurunan output.

2.1.6.4 Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Menurut Murni (2006), jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan:

1. *Creeping Inflation (Single Digit Inflation)*

   Jenis inflasi ini berkisar 0-9% dan inflasi ini masih bisa ditolerir atau inflasi yang diharapkan karena dunia usaha agar tidak mandeg.

2. *Galloping Inflation (Double Digit Inflation)*

   Jenis inflasi ini berkisar 10-90%, inflasi ini sangat berbahaya bagi suatu negara karena bisa menyebabkan suatu negara bangkrut

3. *Hyper Inflation*

   Inflasi ini besarnya di atas 100%, inflasi ini dapat menyebabkan harga barang naik 5-6 kali lipat.

2.1.6.5 Indikator Inflasi

Menurut Murni (2006), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Jika IHK meihat inflasi dari sisi konsumen, maka IHPB melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi
3. Indeks Harga Implisit (GDP deflator) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara. Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan

2.1.6.6 Cara Mengatasi Inflasi

Menurut Nopirin (2014) Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, inflasi harus segera diatasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi yaitu:

1. Kebijakan Moneter
    a) Kebijakan penetapan persediaan kas : Bank Sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar pada bank-bank dengan mewajibkan bank-bank umum yang dapat diedarkan oleh bank-bank umum menjadi sedikit. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan .
    b) Kebijakan Diskonto : Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menerapkan Kebijakan Diskonto dengan cara meningkatan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkuran sehingga inflasi dapat ditekan.
    c) Kebijakan Operasi Pasar Terbuka : melalui kebijakan ini, Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya surat Utang Negara (SUN) semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkta inflai.

d) Kebijakan Rasio Cadangan Wajib : rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, untuk menurunkan jumlah uang beredar pemerintah menaikkan rasio.

e) *Moral Suasion* : kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan melakukan meeting dengan pimpinan bank umum. Hal ini biasnya berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank umum agar sejalan dengan Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Hal ini sangat penting, karena Bank umum harus mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bank Sentral. Apabila ada Bank umum yang tidak mau ikut dalam peraturan Bank Sentral, maka Bank Sentral bisa mengambil tindakan lebih lanjut.

f) Kredit Selektif : Kredit Selektif ini disebut juga dengan nama *"Selective Credit Control"*. Bank Sentral memiliki kewenangan untuk mengatur mana pinjaman prioritas dan bukan. Hal ini erat kaitannya dengan kepemilikan dan penggunaan kartu kredit. Untuk menekan inflasi maka kebijakan yang dipilih oleh Bank sentral yaitu dengan kredit ketat, dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maka dengan itu inflasi dapat berkurang.

2. Kebijakan Fiskal

   Kebijakan Fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan itu antara lain sebagai berikut:

   a) Menghemat pengeluaran pemerintah : pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga.
   b) Menaikkan tarif pajak : untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga dapat turun.

3. Kebijakan Lain di Luar Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

   Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara-cara dalam mengendalikan inflasi yaitu sebagai berikut:

   a) Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar : untuk menambah produksi, pemerintah dapat mengeluarkan produksi. Hal itu dapat ditempuh, Misalnya: dengan memberi petani atau subsidi perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain

itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor.

b) Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang : penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap (*black market*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap peneliti yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Romadhansya Indra Setiyadi dan Purbayu Budi Santosa (2013) denga judul "Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri rokok di Kabupaten Kudus tahun 1993-2010"	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Variabel bebas yang sama yaitu, jumlah unit usaha dan upah	Variabel bebas yang berbeda yaitu suku bunga dan kebijakan pemerintah	Variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di industri rokok di kabupaten kudus tahun 1993-2010 selanjutnya yaitu variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Industri rokok di Kabupaten Kudus tahun 1993-2010, selanjutnya Variabel suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di industri rokok dikabupaten kudus tahun 1993-2010 dan variabel yang terakhir yaitu variabel kebijakan pemerintah yang dilambangkan dengan variabel dummy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus tahun 1993-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Karnawi Kamar (2017) dengan judul "Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten tangerang pada tahun 2009-2015"	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Variabel bebas yang sama yaitu investasi	Variabel bebas yang berbeda yaitu Pertumbuhan ekonomi	Hasil analisis menunjukkan secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif atau terbalik arahnya serta tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten tanggerang pada tahun 2009-2015. Sedangkan investasi berpengaruh positif dan searah serta signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
3	Nur Roh Nunung (2018) dengan judul "Analisis penyerapan tenaga kerja sektor industri di provinsi jawa tengah"	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Variabel bebas yang sama yaitu PDRB dan upah minimum	Variabel bebas yang berbeda yaitu angkatan kerja	Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. variabel upah minimum berpengaruh positif tidak signifikan Sedangkan variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa tengah
4	Yulia Pangastuti (2015) dengan judul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Variabel	Variabel bebas yang berbeda yaitu pengangguran dan PAD	Pengangguran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	tenaga kerja di Jawa tengah"	bebas yang sama yaitu PDRB		Timur. PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di jawa tengah Sedangkan PDRB memiliki pengaruh negatif tidak sginifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. secara bersama-sama PAD, PDRB, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan.
5	Agus Tri Basuki dan Adilah Awain (2015) dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri kecil di Daerah Istimewa Yogjakarta tahun 2009-2014"	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Variabel bebas yang sama yaitu upah minimum, investasi dan jumlah unit usaha	Variabel bebas yang berbeda yaitu nilai produksi	Variabel jumlah unit usaha dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada idnustri kecil di Daerah Istimewa Yogjakarta. Variabel upah minimum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Variabel nilai produksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di industri kecil di Daerah Istimewa Yogjakarta
6	Djupiansyah Ganie (2017) dengan judul "Analisis pengaruh upah, tingkat pendidikan	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Variabel	Variabel bebas yang berbeda yaitu tingkat pendidikan, dan jumlah	Secara Parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten berau

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	jumlah penduduk dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur"	bebas yang sama yaitu upah dan PDRB	penduduk	Kalimantan Timur. Sedangkan Upah minimum, dan juga PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten berau kalimantan timur dan Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan Tenaga kerja di Kabupaten Berau kalimantan timur. Secara bersama-sama upah, Tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.
7	Kiagus Muhammad Zain Basriwijaya, dkk (2015) dengan judul "pengaruh investasi, inflasi, suku bunga dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian provinsi sumatera utara"	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Variabel bebas yang sama yaitu investasi, inflasi dan tingkat upah	Variabel bebas yang berbeda yaitu Suku bunga	Variabel upah dan investasi memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian Sumatera Utara. Variabel suku bunga pinjaman dan variabel inflasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di sumatera utara. Sedangkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Secara bersama-sama variabel upah dan Investasi memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapa tenga kerja
8	Siti Komariyah (2017) dengan judul "Dampak investasi, kinerja ekspor, inflasi dalam penyerapan tenaga kerja indonesia:Analisis data panel"	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Variabel bebas yang sama yaitu Investasi dan inflasi	Variabel bebas yang berbeda yaitu Kinerja ekspor	Variabel kinerja ekspor berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel investasi berpengaruh positif berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia
9	Dini Andriyane Prawoto (2018) dengan judul "Pengaruh IPM, upah minimum, PDRB dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah"	Variabel terikat yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. varaibel bebas yang sama yaitu upah minimum, PDRB dan inflasi	Variabel bebas yang berbeda yaitu IPM	PDRB memilki pengaruh positif dan signifikan. upah minimum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dan inflasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja
10	Tanti siti Rochmani, dkk (2016) dengan judul "Analisis penyerapan tenaga kerja	Variabel terikat yang sama penyerapan tenaga kerja. variabel	Variabel bebas yang berbeda yaitu Laju pertumbuhan ekonomi	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa unit usaha tidak berpengaruh signifikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sektor industri di provinsi jawa tengah"	bebas yang sama yaitu upah minimum, dan unit usaha		Upah minimum dan dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri provinsi jawa tengah

2.3 Kerangka Pemikiran

Agar mempermudah penulis dalam penelitian, maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan hubungan investasi, Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah unit usaha, upah minimum, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

2.3.1 Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya permintaan tenaga kerja. semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja. Perusahaan dapat menggunakan investasi untuk menambah penggunaan faktor produksi. Apabila perusahaan memilih menggunakan investasi yang ada untuk menambah faktor produksi tenaga kerja maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Faktor yang menyebabkan investasi berpengaruh secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu dengan adanya investasi maka dibutuhkan tenaga kerja untuk merealisasikan investasi tersebut. Investasi memainkan peran penting memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun

menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja (Todaro, 2000:137-138).

Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karnawi Kamar (2017) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tanggerang pada tahun 2009-2015. Sehingga berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hubungan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif. Hal ini dikarenakan semakin besar investasi yang dilakukan maka pnyerapan tenaga kerja juga akan bertambah.

2.3.2 Hubungan Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atas sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, maka jumlah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatan untuk mengejar peningkatan yang terjadi (Feriyanto, 2014:43)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini Andriyane Prawoto (2018) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga. Sehingga berdasarkan teori dan

hasil penelitian terdahulu, maka hubungan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap penyerapan teanaga kerja adalah positif. Jika Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat maka jumlah permintaan tenaga kerja juga akan meningkat hal ini menyebabkan terserapnya tenaga kerja.

2.3.3 Hubungan Pertumbuhan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh unit usaha. Semakin meningkatnya unit usaha, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurut Prabowo (dalam Lestari 2011:42), jika unit usaha ditambah maka peran tenaga kerja juga akan bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja, tentunya hal ini dapat menyebabkan terserapnya tenaga kerja.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Agus Tri Basuki (2015) yang juga menyatakan bahwa unit usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga beradsarkan teori dan penelitian terdahulu maka hubungan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif. Hal ini semakin bertambahnya jumlah unit usaha maka lapangan pekerjaan pun akan tersedia dan hal ini akan menyerap jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu hubungan jumlah unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja yaitu positif.

2.3.4 Hubungan Pertumbuhan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Sumarsono (2003:106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila upah minimum naik maka akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi perusahaan, yang mana akan meningkatkan harga barang per unitnya. Biasanya akan cepat memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga pada suatu barang sehingga tingkat konsumsi akan menurun. Hal itu akan mengakibatkan produk yang tidak habis terjual karena berkurangnya konsumsi masyarakat dan perusahaan memaksa untuk mengurangi jumlah produksinya. Dengan adanya pengurangan jumlah produksi suatu barang maka akan membuat kebutuhan akan tenaga kerja berkurang, dan hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akibat penurunan skala produksi. Apabila upah naik terdapat pengusaha yang lebih memilih untuk menggunakan teknologi untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja akan barang modal seperti mesin, hal ini akan mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja berkurang dan tentunya akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djupiansyah Ganie (2017) bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur. Sehingga berdarakan teori dan penelitian terdahulu maka hubungan upah minimum terhadap peneyrapan tenaga kerja adalah negatif. Hal ini karena apabila upah naik maka produsen akan mengganti tenaga kerja

dengan teknologi untuk penghematan pengeluaran dan akibatnya dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dan mengakibatkan menurunya penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya teori dan diperkuat dengan penelitian terdahulu maka hubungan upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja adalah negatif.

2.3.5 Hubungan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Inflasi yang terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang diantaranya adalah inflasi menyebabkan perubahan output dan tenaga kerja. dengan cara perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi dirasa cukup tinggi maka akan mengakibatkan tingkat harga yang tinggi dan menyebabkan tingkat konsumsi menjadi rendah hal ini akan mengakibatkan produsen menurunkan tingkat produksinya dan mengakibatkan berkurangnya permintaan akan tenaga kerja hal ini akan berakibat terhadap menurunya penyerapan tenaga kerja (Nanga, 2005:248)

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Siti Komariyah (2017) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki dampak yang negatif terhadap penyerapan kerja. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hubungan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah negatif. Hal ini karena apabila terjadi inflasi maka perusahaan akan menurunkan output, dengan adanya penurunan output tersebut maka permintaan tenaga kerja berkurang dan berakibat terhadap menurunya penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

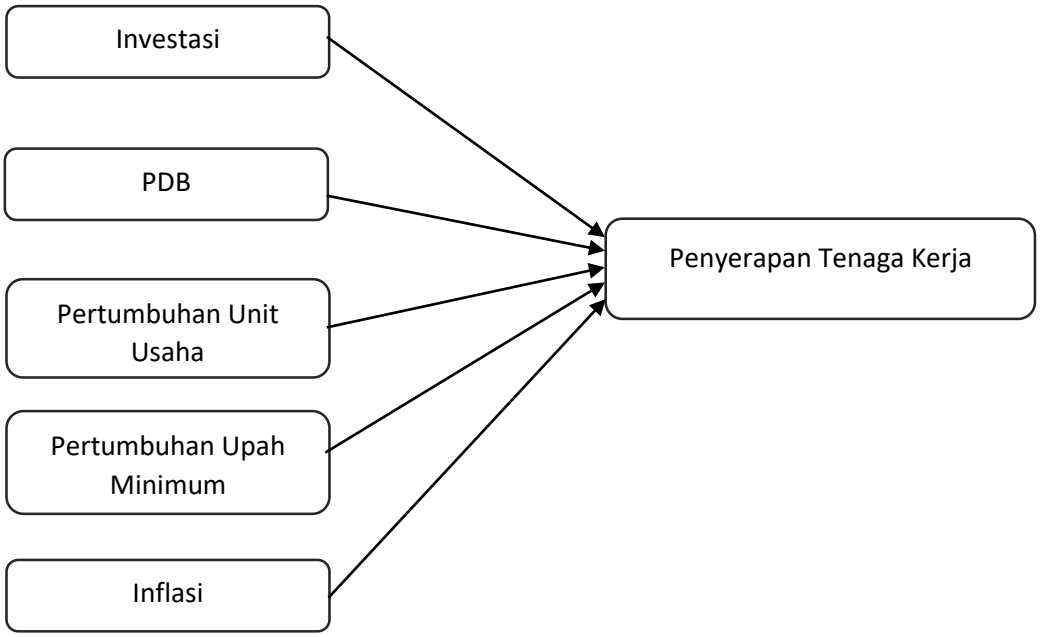

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada gambar 2.3 maka dapat disusun beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Investasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan pertumbuhan unit usaha berpengaruh positif sedangkan pertumbuhan upah minimum dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

2. Diduga secara bersama-sama Investasi, Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan unit usaha, pertumbuhan upah minimum dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.